

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Provinsi Maluku Utara

2014



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

2014

<http://malut.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010- 2014**

Nomor Publikasi : 82550.1504
Katalog BPS : 9302002.82

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 63 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010- 2014**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : M. Habibullah

Editor : Awang Pramila

Penulis : Mia Amalia

Pengolah data : Mia Amalia

<http://malut.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Juli 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Maluku Utara,



M. Habibullah

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.5 Perubahan Inventori	17
2.6 Ekspor dan Impor	20
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN MALUKU UTARA TAHUN 2010-2014	23
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Maluku Utara Menurut Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	28
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	31
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	32
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	35
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	37
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	38
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	39
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	41

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010-2014	43
4.1	PDRB (Nominal)	44
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	45
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	45
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	46
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	47
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	47
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	48
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	50
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	51
	PENUTUP	53
	LAMPIRAN	55
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	24
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	25
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	26
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	27
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	27
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	28
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	30
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	30
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014...	31
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	32
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	32
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	34
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	36
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	37
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	38
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	40
Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	44
Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010-2014.....	45

Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010-2014.....	46
Tabel 20.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	46
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010-2014.....	47
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	48
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	48
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	50
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	51
Tabel 26.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014	25

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	58
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	58
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	59
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	59

PENJELASAN SIMBOL

Simbol yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut :

- * : Angka sementara
- ** : Angka sangat sementara

<http://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

<http://malut.bps.go.id>

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://malt.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

- x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank

Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari

PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah

barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *menginflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non

residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://malut.bps.go.id>

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU
UTARA BERDASARKAN PDRB MENURUT
PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010 - 2014**

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Maluku Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Maluku Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9 638,27	10 566,93	11 546,05	12 841,85	14 113,58
2. Konsumsi LNPRT	169,60	189,57	216,47	247,06	287,66
3. Konsumsi Pemerintah	4 215,40	5 184,81	6 022,77	6 903,32	7 965,61
4. PMTB	3 431,17	4 392,18	5 134,20	5 573,41	6 210,62
5. Perubahan Inventori	678,54	144,02	797,26	514,20	-592,67
6. Ekspor	4 828,17	7 626,92	7 526,42	10 198,23	13 041,66
7. Impor	7 750,37	11 026,30	11 902,71	14 838,45	16 972,96
Total PDRB	14 983,91	17 078,14	19 340,46	21 439,62	24 053,50

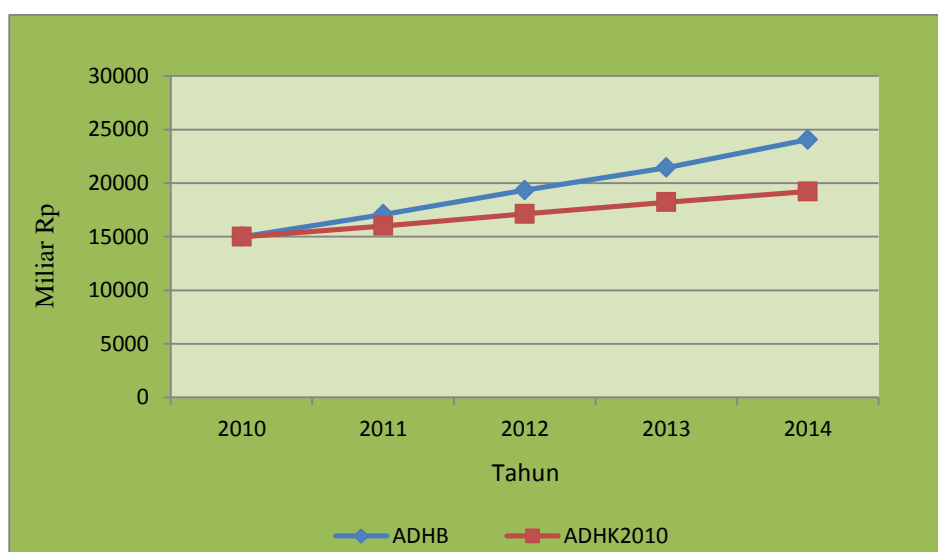
Nilai PDRB Provinsi Maluku Utara (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9 638,27	10 076,34	10 613,69	11 079,91	11 514,56
2. Konsumsi LNPRT	169,60	181,77	196,36	216,15	239,51
3. Konsumsi Pemerintah	4 215,40	4 785,83	5 201,19	5 619,17	6 070,65
4. PMTB	3 431,17	4 212,40	4 659,08	5 026,49	5 251,23
5. Perubahan Inventori	678,54	113,54	688,69	-1 178,25	-450,65
6. Ekspor	4 828,17	8 253,72	8 503,78	11 129,75	12 931,05
7. Impor	7 750,37	11 621,14	12 742,73	13 681,93	16 344,41
Total PDRB	14 983,91	16 002,45	17 120,07	18 211,29	19 211,94

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2104**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,32	61,87	59,70	59,90	58,68
2. Konsumsi LNPRT	1,13	1,11	1,12	1,15	1,20
3. Konsumsi Pemerintah	28,13	30,36	31,14	32,30	33,12
4. PMTB	22,90	25,72	26,55	26,00	25,82
5. Perubahan Inventori	4,53	0,84	4,12	2,40	-2,46
6. Ekspor Luar Negeri	18,22	31,60	26,96	35,93	1,69
7. Impor Luar Negeri	1,51	2,62	0,89	0,44	0,82
8. Net Ekspor Antar Daerah	-37,72	-48,88	-48,69	-57,14	-17,21
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Ekspor luar negeri juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 2 s.d 40 persen produk Provinsi Maluku Utara mampu menembus pasar internasional. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 28 - 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 22 s.d 27 persen. Pada tahun 2010-2014 perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih tinggi dari nilai impor negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”. Sementara itu, perdagangan dalam negeri Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan dengan komponen net ekspor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar

daerah pada tahun 2010-2014. Kecenderungan perdagangan dalam negeri Provinsi Maluku Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,29	4,55	5,33	4,39	3,92
2. Konsumsi LNPRT	7,08	7,18	8,03	10,08	10
3. Konsumsi Pemerintah	0,78	13,53	8,68	8,04	8,03
4. PMTB	5,06	22,77	10,60	7,89	4,47
5. Perubahan Inventori	-609,61	-83,27	506,59	-271,09	-61,75
6. Ekspor Luar Negeri	42,48	122,37	0,82	38,25	-96,21
7. Impor Luar Negeri	779,68	87,97	-61,88	-55,44	124,90
8. Net Ekspor Antar Daerah	19,60	59,43	13,16	7,30	-67,36
Total PDRB	7,26	6,80	6,98	6,37	5,49

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dari tahun 2010 s.d 2014 secara rata-rata mencapai 6,58 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 7,26 persen (2010); 6,80 persen (2011); 6,98 persen (2012); 6,37 persen (2013); dan 5,49 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 7,26 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (5,49 persen).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 - 2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2104**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	104,87	108,78	115,90	122,57
2. Konsumsi LNPRT	100,00	104,29	110,24	114,30	120,10
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	108,34	115,80	122,85	131,22
4. PMTB	100,00	104,27	110,20	110,88	118,27
5. Perubahan Inventori	100,00	126,85	115,76	-43,64	131,51
6. Ekspor	100,00	88,90	85,19	91,04	126,41
7. Impor	100,00	104,87	105,68	129,08	121,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	92,65	92,37	111,97	115,90
Total PDRB	100,00	106,72	112,97	117,73	125,20

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.1 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010—2014**

Uraian		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	Konsumsi Rumah Tangga					
a.	ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	9 638,27	10 566,93	11 546,05	12 841,85	14 113,58
b.	ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	9 638,27	10 076,34	10 613,69	11 079,91	11 514,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)		64,32	61,87	59,70	59,90	58,68
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)						
a.	ADHB	44 731,37	47 943,47	51 239,03	55 769,86	60 013,09
b.	ADHK 2010	44 731,37	45 717,59	47 101,43	48 118,07	48 961,67
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)						
a.	ADHB	9 237,93	9 901,44	10 582,27	11 518,42	12 394,83
b.	ADHK 2010	9 237,93	9 441,74	9 727,74	9 938,06	10 112,32
Pertumbuhan ²						
a.	Total konsumsi RT	3,29	4,55	5,33	4,39	3,92
b.	Per-RT	0,90	2,20	3,03	2,16	1,75
c.	Perkapita	0,90	2,21	3,03	2,16	1,75
Jumlah RT (<i>unit</i>)		215 470	220 404	225 337	230 265	235 175
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)		1 043,34	1 06,21	1 091,08	1 114,90	1 138,67

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

¹ Indeks perkembangan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d. 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 64,32 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 58,68 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Provinsi Maluku Utara menghabiskan dana sekitar 44.731,37 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 45.717,59 ribu rupiah (2011); 47.101,43 ribu rupiah (2012); 48.118,07 ribu rupiah (2013); dan menjadi 48.961,67 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,03 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Maluku Utara meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,75 s.d 3,03 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* sebesar 3,29 persen pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 konsumsi rumah tangga meningkat yaitu sebesar 4,55 persen dan 5,33 persen. Kemudian, menurun pada dua tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 4,39 persen (2013), dan 3,92 persen (2014). Sementara itu, konsumsi per-kapita meningkat dari 0,90 persen di tahun 2010 menjadi sebesar 2,21 persen di tahun 2011 dan 3,03 persen di tahun 2012. Namun pada tahun berikutnya (2013 dan 2014) menurun kembali menjadi 2,16 persen dan 1,75 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berkisar antara 2,13 s.d 2,29 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010—2014³

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	57,03	56,06	55,23	53,49	51,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,44	4,86	4,69	4,94	5,41
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,78	8,02	8,15	8,86	9,19
d. Kesehatan & Pendidikan	7,43	7,29	7,10	7,04	7,36
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,54	16,76	17,38	17,90	18,39
f. Hotel & Restoran	3,16	3,32	3,57	3,63	3,73
g. Lainnya	3,61	3,68	3,88	4,15	4,50
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d. 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Maluku Utara, bahwa konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga yang lainnya. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 57,03 persen (2010); 56,06 persen (2011); 55,23 persen (2012); 53,49 persen (2013); dan 51,42 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, minuman, dan rokok menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga mempunyai peranan yang relatif besar terhadap konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi sekitar 16,54 s.d 18,39 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010—2014

(Persen)					
Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,16	3,11	4,75	3,22	2,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,70	5,75	3,43	5,89	7,15
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,78	4,81	5,50	6,52	7,19
d. Kesehatan & Pendidikan	3,73	4,28	1,42	4,72	5,79
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,99	7,37	8,18	5,67	6,31
f. Hotel & Restoran	6,46	7,09	9,23	6,86	3,08
g. Lainnya	3,84	10,52	7,44	6,77	6,34

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 2,16 persen (2010); 3,11 persen (2011); 4,75 persen (2012); 3,22 persen (2013); dan 2,06 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010—2014⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	4,52	2,75	4,35	3,52
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	13,32	1,96	10,72	12,21
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	7,84	5,19	13,55	6,38
d. Kesehatan & Pendidikan	-	3,08	5,03	5,21	8,72
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	3,51	4,72	8,38	6,20
f. Hotel & Restoran	-	7,50	7,59	5,63	9,79
g. Lainnya	-	1,27	7,14	11,48	11,92

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 4,52 persen (2011); 2,75 persen (2012); 4,35 persen (2013); dan 3,52 persen (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari minus 1,84 persen (2010) menjadi 13,32 persen (2011). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 1,96 persen (2012); 10,72 persen (2013); dan 12,21 persen (2014).

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	169,60	189,57	216,47	247,06	287,66
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	169,60	181,77	196,36	216,15	239,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,13	1,11	1,12	1,15	1,20

Pengeluaran untuk konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara sekitar 1,11 s.d 1,20 persen. Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu mencapai 1,13 persen (2010); 1,11 persen (2011); 1,12 persen (2012); 1,15 persen (2013); dan 1,20 persen (2014).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4 215,40	5 184,81	6 022,77	6 903,32	7 965,61
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)					
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	28,13	30,26	31,14	32,20	33,12
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	4 040,31	4 858,27	5 520,04	6 191,89	6 995,56
b. ADHK 2010	4 040,31	4 484,42	4 767,04	5 040,08	5 331,37
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	102 166,73	118 336,80	138 703,30	161 394,32	175 114,58
b. ADHK 2010	102 166,73	109 230,54	119 782,45	131 371,86	133 456,06

Lanjutan Tabel 11.

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	-	13,53	8,68	8,04	8,03
b. Konsumsi perkapita	-	10,99	6,30	5,73	5,78
c. Konsumsi per-pegawai	-	6,91	9,66	9,68	1,59
Jumlah Pegawai Pemerintah⁶	41 260	43 814	43 422	42 773	45 488
Jumlah penduduk (000 org)	1 043,34	1 062,21	1 091,08	1 114,90	1 138,67

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 4.215,40 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 7.965,61 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 28,13 persen ditahun 2010 hingga mencapai 31,60 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 4.040,31 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang berkisar antara 5,73 persen s.d. 10,99 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 102.166,73 ribu rupiah,

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2013, yaitu masing-masing sebesar 9,66 persen dan 9,68 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2010 s.d 2014 jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pemerintah berjumlah 41.260 orang dan terus meningkat hingga tahun 2011. Namun pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pegawai mengalami penurunan sebesar 43.422 orang (2012) dan 42.773 orang (2013). Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014, secara total terjadi penambahan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 4.228 orang atau naik sebesar 10,25 persen dari tahun 2010. Kenaikan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai pada banyak unit pemerintah.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan total konsumsi pemerintah sebesar 13,53 persen; untuk konsumsi per-kapita 10,99 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 9,68 persen.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	3 252,17	4 102,41	4 707,40	5 491,26	6 386,70
(%)	77,15	79,12	78,16	79,55	80,18
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	963,23	1 082,40	1 315,37	1 412,06	1 578,91
(%)	22,85	20,88	21,84	20,45	19,82
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	4 215,40	5 184,81	6 022,77	6 903,32	7 965,61
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	-	16,28	7,27	10,29	9,27
b. Konsumsi Individu	-	4,24	13,98	0,03	3,19
Total Konsumsi	-	13,53	8,68	8,04	8,03

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁸					
a. Konsumsi Kolektif	-	8,5	7,0	5,8	6,4
b. Konsumsi Individu	-	7,8	6,6	7,3	8,4
Total Konsumsi	-	8,3	6,9	6,1	6,8

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 79 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 10). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya mencapai 77,15 persen dan pada tahun 2011 naik menjadi 79,12 persen. Pada tahun 2012 turun menjadi 78,16 persen dan meningkat kembali di tahun 2013 dan 2014 menjadi 79,55 persen dan 80,18 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2010-2014 juga cenderung menurun. Hanya pada tahun 2012 saja proporsinya meningkat menjadi 21,84 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan secara gradual dari yang sebesar 41.260 orang (2010) menjadi 45.488 orang (2014). Begitu juga jumlah penduduk meningkat dari sejumlah 1.043,34 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 1.138,67 ribu orang pada tahun 2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cukup berfluktuasi dengan masing-masing adalah 25,29 (2010), 24,36 (2011), 25,13 (2012), 26,07 (2013), dan 25,03 (2014). Hal ini berarti pada tahun 2010 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 25 penduduk, dan maka pada tahun 2011 menjadi sekitar 24 penduduk.

3.4 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi

⁸ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010—2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3 431,17	4 392,18	5 134,20	5 573,41	6 210,62
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3 431,17	4 212,40	4 659,08	5 026,49	5 251,23
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	22,90	25,72	26,55	26,00	25,82
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	2 095,63	2 383,20	2 866,78	3 017,86	3 321,83
(%)	61,08	54,26	55,84	54,15	53,49
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1 335,54	2 008,98	2 267,42	2 555,55	2 888,78
(%)	38,92	45,74	44,16	45,85	46,51
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	3 431,17	4 392,18	5 134,20	5 573,41	6 210,62
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	-	9,31	6,45	6,78	5,65
b. Non Bangunan	-	43,88	15,56	9,10	3,20
Total PMTB	-	22,77	10,60	7,89	4,47

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 menurun dari 22,77 persen (2010) menjadi 4,47 persen (2014). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun berfluktuasi tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

Proporsi bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 – 2014 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan pada tahun 2010 sebesar 61,08 persen. Keadaan ini mengalami penurunan menjadi 54,26 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, bangunan meningkat kembali yaitu menjadi 55,84 persen, dan menurun kembali pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 54,15 persen dan 53,49 persen.

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2010 s.d 2014 pertumbuhan bangunan cukup berfluktuasi. Pada tahun 2011 pertumbuhan bangunan mencapai 9,31 persen, kemudian di tahun 2012 menurun sebesar 6,45 persen. Pertumbuhan bangunan kembali meningkat sebesar 6,78 persen pada tahun 2013, namun terjadi penurunan sebesar 5,65 persen pada tahun 2014. Sedangkan Non Bangunan mengalami pertumbuhan cenderung menurun dari tahun 2011 s.d 2014, yaitu dari 43,88 persen tahun 2011 menurun pada tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu sebesar 15,56 persen (2012); 9,10 persen (2013); dan 3,20 persen (2014).

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2011-2014 pertumbuhan total PMTB mengalami penurunan terus menerus di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai besaran angka 22,77 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,47 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	678,54	144,02	797,26	514,20	-592,67
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	678,54	113,54	688,69	-1 178,25	-450,65
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,53	0,84	4,12	2,40	-2,46

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2010 s.d 2013 perubahan inventori bertanda positif (terjadi penambahan persediaan barang) yaitu masing-masing sebesar 678,54 miliar rupiah (2010); 144,02 miliar rupiah (2011); 797,26 miliar rupiah (2012); dan 514,20 miliar rupiah (2013). Namun pada tahun 2014, perubahan inventori mempunyai tanda negatif yaitu minus 592,67 persen.

3.6 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2 729,61	5 396,27	5 213,25	7 702,87	405,64
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2 729,61	6 069,82	6 119,83	8 460,64	320,90
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	18,22	31,60	26,96	35,93	1,69
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	2 694,81	5 350,23	5 175,82	7 670,81	372,68
(%)	98,73	99,15	99,28	99,58	91,87
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	34,80	46,04	37,42	32,06	32,96
(%)	1,27	0,85	0,72	0,42	8,13
Total ekspor (%)	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	-	123,60	0,99	38,59	-96,49
- Jasa	-	26,99	-22,30	-21,72	-7,38
Total ekspor	-	122,37	0,82	38,25	-96,21

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Secara total, nilai ekspor tahun 2014 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 ekspor mengalami peningkatan, dimana nilai ekspor mencapai 2.729,61 miliar rupiah dan tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 5.213,25 miliar rupiah. Tahun 2013 ekspor mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 7.702,87 miliar rupiah. Pada tahun 2014, nilai ekspor merosot cukup tajam yaitu sebesar 405,64 miliar rupiah (. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dari tahun 2010 s.d 2013 dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2.729,61 miliar rupiah (2010); 6.069,82 miliar rupiah (2011); 6.119,83 miliar rupiah (2012); dan 8.460,64 miliar rupiah (2013). Kemudian menurun pada tahun 2014 sebesar 320.90 miliar rupiah. Proporsinya dalam PDRB juga memiliki pola yang sama dengan nilai nominal ekspor, yaitu dari 18,22 persen pada tahun 2010 menjadi 1,69 persen di tahun 2014.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Provinsi Maluku Utara berupa barang (rata-rata 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2011 dan 2013, masing-masing mencapai 122,37 persen dan 38,25 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2014 (minus 96,21 persen) dari tahun 2013 yang tumbuh sebesar 38,25 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2014 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing minus 96,49 persen (barang) dan minus 7,38 persen (jasa). Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penurunan nilai ekspor baik barang maupun jasa pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2012 ekspor hanya tumbuh sebesar 0,82 persen.

3.7 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	226,87	447,19	171,77	93,49	197,90
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	226,87	426,43	162,54	72,43	162,90
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	1,51	2,62	0,89	0,44	0,82
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	193,67	410,73	137,11	52,66	152,91
(%)	85,37	91,85	79,82	56,32	77,27
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	33,20	36,46	34,66	40,84	44,99
(%)	14,63	8,15	20,18	43,68	22,73
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang	-	101,29	-66,49	-69,92	234,10
- Jasa	-	10,26	-12,88	3,91	-4,59
Total impor	-	87,97	-61,88	-55,44	124,90

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor luar negeri Provinsi Maluku Utara pada periode tahun 2010 s.d 2014 mengalami fluktuasi (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Nilai impor tertinggi terjadi di tahun 2011 dan terendah di tahun 2013 dengan besaran masing-masing yaitu 447,19 miliar rupiah (2011) dan 93,49 miliar rupiah (2013).

Proporsi impor luar negeri pada tahun 2010 s.d 2014 memiliki rata-rata sebesar 1,26 persen. Dengan masing-masing proporsi impor luar negeri sebesar 1,51 persen (2010); 2,62 persen (2011); 0,89 persen (2012); 0,44 persen (2013), dan 0,82 persen (2014).

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2011 dan 2014 sebesar 87,97 persen dan 124,90 persen. Pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan impor mengalami kontraksi yaitu minus 61,88 persen dan 55,44 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan impor barang yang mana pada tahun 2012 dan 2013 juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 66,49 persen dan 69,92 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 123,60 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 78,12 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2010 - 2014, struktur impor luar negeri baik dalam bentuk barang maupun jasa mengalami fluktuasi.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://malut.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010 - 2014

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	14 983,91	17 078,14	19 340,46	21 439,62	24 053,50
- ADHK 2010	14 983,91	16 002,45	17 120,07	18 211,29	19 211,94
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	14 361,54	16 002,57	17 726,06	19 230,14	21 124,26
- ADHK 2010	14 361,54	14 994,63	15 691,01	16 334,50	16 872,31
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	4,41	4,64	4,10	3,29
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1 043,34	1 067,21	1 091,08	1 114,90	1 138,67
Pertumbuhan	-	2,29	2,24	2,18	2,13

PDRB per-kapita Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Maluku Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,21 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Provinsi Maluku Utara (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	9 638,27	10 566,93	11 546,05	12 841,85	14 113,58
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	4 828,17	7 626,92	7 526,42	10 198,23	13 041,66
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,00	1,39	1,53	1,26	1,08

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,00 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang relatif tajam pada tahun 2011 (1,39) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010—2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	9 638,27	10 566,93	11 546,05	12 841,85	14 113,58
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3 431,17	4 392,18	5 134,20	5 573,41	6 210,62
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,81	2,41	2,25	2,30	2,27

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,81 pada tahun 2010 menjadi 2,41 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 2,25 (2012), namun meningkat di tahun 2013 sebesar 2,30 dan kembali menurun menjadi 2,27 (2014). Hal ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	9 638,27	10 566,93	11 546,05	12 841,85	14 113,58
b. LNPRT	169,60	189,57	216,47	247,06	287,66
c. Pemerintah	4 215,40	5 184,81	6 022,77	6 903,32	7 965,61
J u m l a h	14 023,26	15 941,31	17 785,29	19 992,22	22 366,86
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	14 983,91	17 078,14	19 340,46	21 439,62	24 053,50
Proporsi	93,59	93,34	91,96	93,25	92,99

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 90 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010—2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	4 828,17	7 626,92	7 526,42	10 198,23	13 041,66
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3 431,17	4 392,18	5 134,20	5 573,41	6 210,62
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,41	1,74	1,47	1,83	2,10

Pada tahun 2010 s.d 2014 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	14 983,91	17 078,14	19 340,46	21 439,62	24 053,50
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	7 977,24	11 026,30	11902,71	14 838,45	16 972,96
Rasio PDRB terhadap Impor	1,88	1,55	1,62	1,44	1,42

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2011 menunjukkan penurunan dari 1,88 (2010) menjadi 1,55 (2011). Kemudian meningkat pada tahun 2012 yaitu menjadi 1,62 dan menurun pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1,44 (2013) dan 1,42 (2014). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2010 (1,88), lebih disebabkan peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Penurunan rasio menunjukkan meningkatnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	14 983,91	17 078,14	19 340,46	21 439,62	24 053,50
%	(65,26)	(60,77)	(61,90)	(59,10)	(58,63)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	7 977,24	11 026,30	11 902,71	14 838,45	16 972,96
%	(34,74)	(39,23)	(38,10)	(40,90)	(41,37)
<u>Total Permintaan Akhir</u> ¹⁶ (Miliar Rp)	22 961,15	28 104,44	31 243,18	36 278,07	41 026,46
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

¹⁶ Termasuk diskrepansi statistik

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, dengan rentang 34 s.d. 41 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 61 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 22.961,15 miliar rupiah (2010) menjadi sebesar 41.026,46 miliar rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 14.983,91 miliar rupiah (2010); 17.078,14 miliar rupiah (2011); 19.340,46 miliar rupiah (2012); 21.439,62 miliar rupiah (2013); dan 24.053,50 miliar rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 7.977,24 miliar rupiah (2010); 11.026,30 miliar rupiah (2011); 11.902,71 miliar rupiah (2012); 14.838,45 miliar rupiah (2013); dan 16.972,96 miliar rupiah (2014).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	4 828,17	7 626,92	7 526,42	10 198,23	13 041,66
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	7 977,24	11 026,30	11902,71	14 838,45	16 972,96
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-3 149,07	-3 399,38	-4 376,29	-4 640,21	-3 931,30
Rasio ekspor terhadap Impor	0,61	0,69	0,63	0,69	0,77

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Provinsi Maluku Utara yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar minus 3.149,07 miliar rupiah (2010), minus 3.399,38 miliar rupiah (2011), minus 4.376,29 miliar rupiah (2012), minus 4.640,21 miliar rupiah (2013), dan minus 3.931,30 miliar rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,61 menjadi sekitar 0,69 pada tahun 2011; kemudian 0,63 pada tahun 2012; 0,69 pada tahun 2013 dan 0,77 pada tahun 2014.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara 0 dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara 0 dan positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	2 729,61	5 396,27	5 213,25	7 702,87	405,64
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	226,87	447,19	171,77	93,49	197,90
(X – M) (Miliar Rp)	2 502,75	4 949,08	5 041,48	7 609,38	207,74
(X +M) (Miliar Rp)	2 956,48	5 843,46	5 385,02	7 796,36	603,55
R P I	0,85	0,85	0,94	0,98	0,34

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010-2014, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus meningkat dari 2.729,61 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 7.702,87 miliar rupiah pada tahun 2013, namun menurun menjadi 405,64 pada tahun 2014. Berbeda dengan kecenderungan impor, yang memiliki nilai yang berfluktuasi setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Maluku Utara pada periode 2010-2014 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio antara 0,34 s.d 0,98.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	14 983,91	16 002,45	17 120,07	18 211,29	19 211,94
Perubahan (miliar rupiah)	-	1 018,54	1 117,62	1 091,22	1 000,65
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	3 431,17	4 212,40	4 659,08	5 026,49	5 251,23
ICOR	-	4,14	4,17	4,61	5,25

Data di atas menunjukkan besaran ICOR Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 4,14 (2011) menjadi 4,17 (2012); 4,61 (2013); dan 5,25 (2014).

<http://malut.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d. 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Maluku Utara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d. 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Maluku Utara terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://malut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9 638 268,0	10 566 933,4	11 546 049,5	12 841 847,6	14 113 579,5
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5 496 955,6	5 924 175,5	6 376 361,8	6 868 546,7	7 257 146,4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	428 312,0	513 286,8	541 264,7	634 585,5	762 958,3
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	749 955,8	847 663,5	940 696,0	1 137 830,0	1 297 446,2
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	716 414,8	770 065,0	820 260,9	903 737,3	1 039 445,7
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1 593 940,7	1 771 429,5	2 006 819,2	2 298 186,1	2 594 844,9
1.f. Hotel dan Restoran	304 912,2	351 034,1	412 557,7	465 651,9	526 975,2
1.g. Lainnya	347 777,0	389 279,0	448 089,1	533 310,2	634 762,9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169 597,1	189 572,0	216 469,2	247 056,5	287 664,5
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4 215 399,1	5 184 808,4	6 022 774,6	6 903 319,1	7 965 612,1
3.a. Konsumsi Kolektif	3 252 173,8	4 102 413,1	4 707 404,4	5 491 257,0	6 386 700,6
3.b. Konsumsi Individu	963 225,3	1 082 395,3	1 315 370,3	1 412 062,1	1 578 911,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3 431 172,1	4 392 183,4	5 134 204,6	5 573 409,5	6 210 616,6
4.a. Bangunan	2 095 628,6	2 383 204,8	2 866 781,5	3 017 863,3	3 321 832,8
4.b. Non-Bangunan	1 335 543,5	2 008 978,6	2 267 423,1	2 555 546,2	2 888 783,7
5. Perubahan Inventori	678 544,9	144 022,8	797 255,6	514 204,2	(592 670,2)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	2 729 614,3	5 396 271,8	5 213 249,1	7 702 871,9	405 644,6
6.a. Barang	2 694 812,3	5 350 227,5	5 175 824,4	7 670 811,1	372 684,4
6.b. Jasa	34 801,9	46 044,3	37 424,8	32 060,9	32 960,2
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	226 868,3	447 190,2	171 769,8	93 492,4	197 903,5
7.a. Barang	193 669,2	410 731,9	137 108,5	52 655,7	152 911,8
7.b. Jasa	33 199,1	36 458,3	34 661,3	40 836,7	44 991,8
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(5 651 815,3)	(8 348 462,3)	(9 417 769,1)	(12 249 592,2)	(4 139 043,5)
8.a. Ekspor	2 098 556,1	2 230 650,5	2 313 174,9	2 495 360,9	12 636 017,3
8.b. Impor	7 750 371,4	10 579 112,8	11 730 944,0	14 744 953,1	16 775 060,8
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	14 983 911,9	17 078 139,3	19 340 463,8	21 439 624,2	24 053 500,0

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9 638 268,0	10 076 339,1	10 613 694,2	11 079 907,9	11 514 560,0
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5 496 955,6	5 667 971,3	5 937 186,8	6 128 618,0	6 255 134,1
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	428 312,0	452 937,2	468 458,6	496 050,8	531 516,7
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	749 955,8	786 042,6	829 257,3	883 334,1	946 840,5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	716 414,8	747 084,5	757 706,4	793 481,6	839 428,0
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1 593 940,7	1 711 385,5	1 851 435,8	1 956 373,5	2 079 870,4
1.f. Hotel dan Restoran	304 912,2	326 539,3	356 691,8	381 152,6	392 902,3
1.g. Lainnya	347 777,0	384 378,8	412 957,6	440 897,3	468 868,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169 597,1	181 769,0	196 358,5	216 150,1	239 512,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4 215 399,1	4 785 826,7	5 201 193,6	5 619 168,6	6 070 649,4
3.a. Konsumsi Kolektif	3 252 173,8	3 781 774,1	4 056 761,7	4 474 358,6	4 889 309,4
3.b. Konsumsi Individu	963 225,3	1 004 052,7	1 144 431,9	1 144 809,9	1 181 340,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3 431 172,1	4 212 398,3	4 659 083,8	5 026 494,3	5 251 233,5
4.a. Bangunan	2 095 628,6	2 290 797,0	2 438 554,4	2 603 929,5	2 751 132,3
4.b. Non-Bangunan	1 335 543,5	1 921 601,3	2 220 529,4	2 422 564,8	2 500 101,1
5. Perubahan Inventori	678 544,9	113 535,6	688 690,3	(1 178 247,4)	(450 650,3)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	2 729 614,3	6 069 815,9	6 119 829,2	8 460 635,3	320 897,9
6.a. Barang	2 694 812,3	6 025 621,9	6 085 491,7	8 433 754,2	296 000,1
6.b. Jasa	34 801,9	44 194,1	34 337,5	26 881,1	24 897,8
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	226 868,3	426 433,1	162 535,6	72 431,0	162 898,3
7.a. Barang	193 669,2	389 829,3	130 645,2	39 294,9	131 283,5
7.b. Jasa	33 199,1	36 603,8	31 890,4	33 136,1	31 614,8
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(5 651 815,3)	(9 010 799,6)	(10 196 244,3)	(10 940 390,5)	(3 571 362,9)
8.a. Ekspor	2 098 556,1	2 183 908,5	2 383 954,8	2 669 111,1	12 610 153,8
8.b. Impor	7 750 371,4	11 194 708,0	12 580 199,2	13 609 501,6	16 181 516,7
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	14 983 911,9	16 002 452,0	17 120 069,8	18 211 287,1	19 211 941,7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	64,32	61,87	59,70	59,90	58,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	36,69	34,69	32,97	32,04	30,17
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,86	3,01	2,80	2,96	3,17
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,01	4,96	4,86	5,31	5,39
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,78	4,51	4,24	4,22	4,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,64	10,37	10,38	10,72	10,79
1.f. Hotel dan Restoran	2,03	2,06	2,13	2,17	2,19
1.g. Lainnya	2,32	2,28	2,32	2,49	2,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,11	1,12	1,15	1,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	28,13	30,36	31,14	32,20	33,12
3.a. Konsumsi Kolektif	21,70	24,02	24,34	25,61	26,55
3.b. Konsumsi Individu	6,43	6,34	6,80	6,59	6,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	22,90	25,72	26,55	26,00	25,82
4.a. Bangunan	13,99	13,95	14,82	14,08	13,81
4.b. Non-Bangunan	8,91	11,76	11,72	11,92	12,01
5. Perubahan Inventori	4,53	0,84	4,12	2,40	(2,46)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	18,22	31,60	26,96	35,93	1,69
6.a. Barang	17,98	31,33	26,76	35,78	1,55
6.b. Jasa	0,23	0,27	0,19	0,15	0,14
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,51	2,62	0,89	0,44	0,82
7.a. Barang	1,29	2,41	0,71	0,25	0,64
7.b. Jasa	0,22	0,21	0,18	0,19	0,19
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(37,72)	(48,88)	(48,69)	(57,14)	(17,21)
8.a. Ekspor	14,01	13,06	11,96	11,64	52,53
8.b. Impor	51,72	61,95	60,65	68,77	69,74
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	64,32	62,97	62,00	60,84	59,93
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,71	30,58	29,94	28,96	27,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,98	4,84	4,74	4,69	4,66
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,86	2,83	2,74	2,72	2,77
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,59	3,52	3,45	3,45	3,52
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,42	1,39	1,39	1,40	1,41
1.f. Hotel dan Restoran	3,27	3,20	3,02	2,97	2,97
1.g. Lainnya	4,88	4,92	4,99	4,89	4,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,14	1,15	1,19	1,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	28,13	29,91	30,38	30,86	31,60
3.a. Konsumsi Kolektif	21,70	23,63	23,70	24,57	25,45
3.b. Konsumsi Individu	6,43	6,27	6,68	6,29	6,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	22,90	26,32	27,21	27,60	27,33
4.a. Bangunan	13,99	14,32	14,24	14,30	14,32
4.b. Non-Bangunan	8,91	12,01	12,97	13,30	13,01
5. Perubahan Inventori	4,53	0,71	4,02	(6,47)	(2,35)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	18,22	37,93	35,75	46,46	1,67
6.a. Barang	17,98	37,65	35,55	46,31	1,54
6.b. Jasa	0,23	0,28	0,20	0,15	0,13
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,51	2,66	0,95	0,40	0,85
7.a. Barang	1,29	2,44	0,76	0,22	0,68
7.b. Jasa	0,22	0,23	0,19	0,18	0,16
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(37,72)	(56,31)	(59,56)	(60,07)	(18,59)
8.a. Ekspor	14,01	13,65	13,92	14,66	65,64
8.b. Impor	51,72	69,96	73,48	74,73	84,23
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,64	9,27	11,22	9,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,77	7,63	7,72	5,66
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	19,84	5,45	17,24	20,23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,03	10,98	20,96	14,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,49	6,52	10,18	15,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,14	13,29	14,52	12,91
1.f. Hotel dan Restoran	15,13	17,53	12,87	13,17
1.g. Lainnya	11,93	15,11	19,02	19,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	11,78	14,19	14,13	16,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	23,00	16,16	14,62	15,39
3.a. Konsumsi Kolektif	26,14	14,75	16,65	16,31
3.b. Konsumsi Individu	12,37	21,52	7,35	11,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	28,01	16,89	8,55	11,43
4.a. Bangunan	13,72	20,29	5,27	10,07
4.b. Non-Bangunan	50,42	12,86	12,71	13,04
5. Perubahan Inventori	(78,77)	453,56	(35,50)	(215,26)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	97,69	(3,39)	47,76	(94,73)
6.a. Barang	98,54	(3,26)	48,20	(95,14)
6.b. Jasa	32,30	(18,72)	(14,33)	2,81
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	97,11	(61,59)	(45,57)	111,68
7.a. Barang	112,08	(66,62)	(61,60)	190,40
7.b. Jasa	9,82	(4,93)	17,82	10,17
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	47,71	12,81	30,07	(66,21)
8.a. Ekspor	6,29	3,70	7,88	406,38
8.b. Impor	36,50	10,89	25,69	13,77
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	13,98	13,25	10,85	12,19

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,55	5,33	4,39	3,92
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,11	4,75	3,22	2,06
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,75	3,43	5,89	7,15
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,81	5,50	6,52	7,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,28	1,42	4,72	5,79
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,37	8,18	5,67	6,31
1.f. Hotel dan Restoran	7,09	9,23	6,86	3,08
1.g. Lainnya	10,52	7,44	6,77	6,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	7,18	8,03	10,08	10,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	13,53	8,68	8,04	8,03
3.a. Konsumsi Kolektif	16,28	7,27	10,29	9,27
3.b. Konsumsi Individu	4,24	13,98	0,03	3,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	22,77	10,60	7,89	4,47
4.a. Bangunan	9,31	6,45	6,78	5,65
4.b. Non-Bangunan	43,88	15,56	9,10	3,20
5. Perubahan Inventori	(83,27)	506,59	(271,09)	(61,75)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	122,37	0,82	38,25	(96,21)
6.a. Barang	123,60	0,99	38,59	(96,49)
6.b. Jasa	26,99	(22,30)	(21,72)	(7,38)
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	87,97	(61,88)	(55,44)	124,90
7.a. Barang	101,29	(66,49)	(69,92)	234,10
7.b. Jasa	10,26	(12,88)	3,91	(4,59)
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	59,43	13,16	7,30	(67,36)
8.a. Ekspor	4,07	9,16	11,96	372,45
8.b. Impor	44,44	12,38	8,18	18,90
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,80	6,98	6,37	5,49

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlakau Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	109,64	119,79	133,24	146,43
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	107,77	116,00	124,95	132,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	119,84	126,37	148,16	178,13
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	113,03	125,43	151,72	173,00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	107,49	114,50	126,15	145,09
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	111,14	125,90	144,18	162,79
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	115,13	135,30	152,72	172,83
1.g. Lainnya	100,00	111,93	128,84	153,35	182,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	111,78	127,64	145,67	169,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	123,00	142,88	163,76	188,96
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	126,14	144,75	168,85	196,38
3.b. Konsumsi Individu	100,00	112,37	136,56	146,60	163,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	128,01	149,63	162,43	181,01
4.a. Bangunan	100,00	113,72	136,80	144,01	158,51
4.b. Non-Bangunan	100,00	150,42	169,78	191,35	216,30
5. Perubahan Inventori	100,00	21,23	117,49	75,78	(87,34)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	197,69	190,99	282,20	14,86
6.a. Barang	100,00	198,54	192,07	284,65	13,83
6.b. Jasa	100,00	132,30	107,54	92,12	94,71
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	197,11	75,71	41,21	87,23
7.a. Barang	100,00	212,08	70,80	27,19	78,96
7.b. Jasa	100,00	109,82	104,40	123,01	135,52
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	147,71	166,63	216,74	73,23
8.a. Ekspor	100,00	106,29	110,23	118,91	602,13
8.b. Impor	100,00	136,50	151,36	190,25	216,44
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	113,98	129,07	143,08	160,53

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,55	110,12	114,96	119,47
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	103,11	108,01	111,49	113,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	105,75	109,37	115,82	124,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	104,81	110,57	117,78	126,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,28	105,76	110,76	117,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	107,37	116,15	122,74	130,49
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,09	116,98	125,00	128,86
1.g. Lainnya	100,00	110,52	118,74	126,78	134,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	107,18	115,78	127,45	141,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	113,53	123,39	133,30	144,01
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	116,28	124,74	137,58	150,34
3.b. Konsumsi Individu	100,00	104,24	118,81	118,85	122,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	122,77	135,79	146,49	153,04
4.a. Bangunan	100,00	109,31	116,36	124,26	131,28
4.b. Non-Bangunan	100,00	143,88	166,26	181,39	187,20
5. Perubahan Inventori	100,00	16,73	101,50	(173,64)	(66,41)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	222,37	224,20	309,96	11,76
6.a. Barang	100,00	223,60	225,82	312,96	10,98
6.b. Jasa	100,00	126,99	98,67	77,24	71,54
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	187,97	71,64	31,93	71,80
7.a. Barang	100,00	201,29	67,46	20,29	67,79
7.b. Jasa	100,00	110,26	96,06	99,81	95,23
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	159,43	180,41	193,57	63,19
8.a. Ekspor	100,00	104,07	113,60	127,19	600,90
8.b. Impor	100,00	144,44	162,32	175,60	208,78
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,80	114,26	121,54	128,22

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,87	108,78	115,90	122,57
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	104,52	107,40	112,07	116,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	113,32	115,54	127,93	143,54
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	107,84	113,44	128,81	137,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	103,08	108,26	113,90	123,83
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	103,51	108,39	117,47	124,76
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,50	115,66	122,17	134,12
1.g. Lainnya	100,00	101,27	108,51	120,96	135,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	104,29	110,24	114,30	120,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	108,34	115,80	122,85	131,22
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	108,48	116,04	122,73	130,63
3.b. Konsumsi Individu	100,00	107,80	114,94	123,34	133,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	104,27	110,20	110,88	118,27
4.a. Bangunan	100,00	104,03	117,56	115,90	120,74
4.b. Non-Bangunan	100,00	104,55	102,11	105,49	115,55
5. Perubahan Inventori	100,00	126,85	115,76	(43,64)	131,51
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	88,90	85,19	91,04	126,41
6.a. Barang	100,00	88,79	85,05	90,95	125,91
6.b. Jasa	100,00	104,19	108,99	119,27	132,38
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	104,87	105,68	129,08	121,49
7.a. Barang	100,00	105,36	104,95	134,00	116,47
7.b. Jasa	100,00	99,60	108,69	123,24	142,31
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	92,65	92,37	111,97	115,90
8.a. Ekspor	100,00	102,14	97,03	93,49	100,21
8.b. Impor	100,00	94,50	93,25	108,34	103,67
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,72	112,97	117,73	125,20

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,87	3,73	6,54	5,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,52	2,75	4,35	3,52
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13,32	1,96	10,72	12,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,84	5,19	13,55	6,38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,08	5,03	5,21	8,72
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,51	4,72	8,38	6,20
1.f. Hotel dan Restoran	7,50	7,59	5,63	9,79
1.g. Lainnya	1,27	7,14	11,48	11,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,29	5,70	3,68	5,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,34	6,89	6,09	6,81
3.a. Konsumsi Kolektif	8,48	6,97	5,76	6,44
3.b. Konsumsi Individu	7,80	6,62	7,32	8,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,27	5,69	0,62	6,66
4.a. Bangunan	4,03	13,00	(1,42)	4,18
4.b. Non-Bangunan	4,55	(2,33)	3,31	9,53
5. Perubahan Inventori	26,85	(8,74)	(137,70)	(401,35)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(11,10)	(4,18)	6,88	38,84
6.a. Barang	(11,21)	(4,21)	6,94	38,43
6.b. Jasa	4,19	4,61	9,43	10,99
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	4,87	0,78	22,14	(5,88)
7.a. Barang	5,36	(0,39)	27,68	(13,08)
7.b. Jasa	(0,40)	9,12	13,39	15,48
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(7,35)	(0,31)	21,22	3,51
8.a. Ekspor	2,14	(5,00)	(3,65)	7,18
8.b. Impor	(5,50)	(1,32)	16,19	(4,32)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,72	5,85	4,21	6,35

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



DATA

Mencerdaskan Bangsa